

Melawan Diam-Diam di Tengah Dominasi: Kajian Strategi Penerimaan Sosial Politik Kelompok Minoritas Syiah di Kabupaten Jember

Fikri Disyacitta¹

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengelaborasi bagaimana strategi gerakan sosial minoritas keagamaan Syiah dalam bentuk repertoir sehari-hari mendapatkan penerimaan sosial di bawah dominasi mayoritas warga NU (Sunni) di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kasus yang didalami dalam artikel ini adalah aktivitas IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bayt Indonesia) di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Konsep contentious politics digunakan untuk memahami prakondisi bagi kemunculan IJABI Jember. Selanjutnya, konsep repertoir bermanfaat untuk menjelaskan apa saja upaya IJABI dalam menegaskan klaim keberadaan mereka di Jember. Artikel ini berargumentasi bahwa sempitnya struktur kesempatan politik mayoritas yang tidak mengizinkan nilai keyakinan yang dianggap menyimpang membuat gerakan Syiah mengalami tekanan dalam melakukan klaim teologis mereka. Respons terhadap hal ini dilakukan oleh IJABI berpartisipasi dalam kegiatan yang secara implisit dan halus dengan target diterima secara sosial. Bentuk kegiatannya berupa aksi filantropi tanggap bencana dan menyediakan jasa spiritual secara cuma-cuma bagi masyarakat. Menggunakan pendekatan dan teknik pengumpulan metode kualitatif, artikel berbasis pada data lapangan hasil wawancara mendalam dan observasi partisipan sepanjang bulan November 2014 – April 2015.

Kata kunci: Syiah; NU; Minoritas; Repertoir; Gerakan Sosial; Contentious Politics

1 Penulis adalah peneliti PolGov UGM dan tengah menempuh program Doktor Ilmu Politik FISIPOL UGM.

PENDAHULUAN

Artikel ini berupaya mengelaborasi strategi yang digunakan oleh kelompok minoritas Syiah yang bernaung di bawah ormas Ikatan Jamaah Ahlul Bayt Indonesia (selanjutnya disebut IJABI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur dalam mendapatkan penerimaan sosial melalui gerakan sosial dalam bentuk repertoir di tengah dominasi muslim Sunni yang berafiliasi ke organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Dalam konteks artikel ini, repertoir dapat dipahami sebagai “ekspresi atau tindakan untuk memperoleh perhatian pemegang otoritas” (Tilly, 2006). Sebagaimana diketahui Syiah adalah kelompok minoritas Islam yang keberadaannya secara resmi ditolak di Indonesia, terutama setelah beredar luas buku panduan terbitan MUI Pusat berjudul *Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia* pada November 2013 silam (Idhom, 2013; Alfiyah, 2014). Sedangkan di Provinsi Jawa Timur, MUI Provinsi Jawa Timur mengambil langkah ekstrim dengan mengesahkan fatwa kesesatan paham Syiah pasca konflik berdarah antara warga NU dengan komunitas Syiah di Sampang, Madura yang meletus pada bulan Ramadan tahun 2012 (Afdillah, 2016; Savitri, 2012).

Oleh sebab itu, mereka mengalami eksklusi sosial di kalangan kelompok Islam *mainstream* beraliran Sunni di negeri ini. Kelompok ini mengalami perlakuan diskriminatif akibat sentimen negatif terhadap komunitas Syiah. Meski demikian, pada kurun waktu 2013–2014 ormas IJABI Jember justru aktif bergerak di masyarakat melalui kegiatan filantropi, diskusi keilmuan lintas keyakinan, maupun keterlibatan dalam forum keagamaan. Strategi yang dipilih IJABI Jember tersebut berupa pendekatan bersifat konformis, yakni sebisa mungkin menghindari aksi-aksi yang bersifat menantang langsung dominasi mayoritas Sunni. Hal ini dapat dianggap sebagai upaya membuka struktur kesempatan politik (*political opportunity*) dan dilakukan melalui repertoir untuk melakukan klaim keberadaan mereka.

Studi Latief (2008) dan Zulkifli (2013) menjelaskan mekanisme adaptasi kelompok Syiah di Indonesia di tengah lingkungan Sunni. Keduanya berargumen bahwa konsep menyembunyikan keimanan atau *taqiyyah*, yakni meleburkan diri dalam praktik keagamaan dominan ketika berada di ruang publik menjadi strategi utama bagi kaum Syiah untuk menghindarkan diri dari kemungkinan persekusi. Selain *taqiyyah*, mereka berpendapat bahwa ormas Syiah secara umum lebih memilih mengoptimalkan publikasi buku, diskusi keilmuan, dan pembentukan lembaga pendidikan sebagai strategi untuk memperkenalkan ajarannya kepada khalayak luas. Studi keduanya dengan baik telah menemukan pola umum modus operandi masyarakat Syiah melalui taktik peleburan dan bergerak melalui pendekatan akademik. Hanya saja, keduanya belum melakukan pemetaan terhadap penggunaan strategi lain di luar dua hal tersebut.

Assegaf (2012) dalam tulisannya menggali bahwa selain berdakwah melalui jalur pendidikan, ormas Syiah di Indonesia seperti IJABI turut terlibat dalam kegiatan sosial seperti menerjunkan tim relawan untuk membantu korban tsunami Aceh pada tahun 2004. Selain itu, ormas ini tercatat sempat ikut dalam aktivisme politik saat memutuskan berpartisipasi bersama ormas Islam berhaluan Sunni dalam aksi protes turun ke jalan menentang kartun Nabi Muhammad sebagai upaya mengklaim bahwa IJABI dan kaum Syiah di Indonesia memiliki komitmen kepedulian yang sama terhadap problematika umat Islam. Temuan ini sebenarnya menarik namun kurang dieksplorasi secara mendalam karena Assegaf kembali mengulang argumentasi Latief (2008) dan Zulkifli (2013) mengenai signifikansi lembaga pendidikan formal dan informal sebagai episentrum sosialisasi ajaran Syiah. Intinya, kelompok ini berupaya menjadi bagian dari kegiatan sosial warga negara pada umumnya, sebagai strategi untuk dapat diterima secara sosial.

Sebagaimana diketahui, minoritas Syiah di Jawa Timur khususnya Jember mendapat stigma sebagai keyakinan menyimpang oleh warga mayoritas NU yang diperkuat ulama anti Syiah dalam ceramahnya di berbagai forum keagamaan. Ketegangan di ranah teologis ini sempat meningkat eskalasinya menjadi konflik terbuka Sunni-Syiah pada tahun 2013 hingga mengakibatkan satu korban jiwa dari massa NU. Di tengah kondisi tersebut, ormas IJABI Jember sebagai gerakan sosial yang berupaya merepresentasikan dan mengkonsolidasikan penganut Syiah di kabupaten tersebut justru hadir dengan pendekatan yang tidak menantang secara langsung kelompok mayoritas. Artikel ini berupaya memahami bagaimana IJABI Jember mengoperasionalkan repertoir untuk mendorong penerimaan sosial terhadap keberadaan minoritas Syiah oleh mayoritas warga Sunni-NU di Kabupaten Jember pada dua periodisasi waktu, yaitu 2001–2012 dan 2013–2014.

Data dalam artikel ini diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam, observasi partisipan, *shadowing* terhadap informan penelitian, dan menelusuri sumber-sumber sekunder yang dilakukan sepanjang bulan November 2014–April 2015.

CONTENTIOUS POLITICS KE REPERTOIR GERAKAN SOSIAL: KAJIAN LITERATUR

Artikel ini menggunakan konsep *contentious politics* yang berguna untuk memetakan, seperti apakah prakondisi sosial keagamaan yang membuat minoritas Syiah kemudian merasa perlu mendirikan IJABI Jember dan beraktivitas di dalamnya. Sedangkan untuk memahami berbagai pilihan upaya minoritas Syiah dalam merebut klaim dari mayoritas NU, konsep repertoir bermanfaat dalam mengidentifikasi struktur kesempatan politik dan apa saja sumber daya gerakan yang tersedia sehingga sebuah klaim dapat berhasil atau justru menjumpai kegagalan. Beberapa studi kasus mengenai aktivisme kolektif kaum Syiah

di berbagai negara telah menggunakan *contentious politics* dan repertoir sebagai instrumen analisisnya. Di Bahrain, Lawson dalam Wiktorowicz (2012) mengamati bahwa demonstrasi yang diikuti serangkaian aksi kekerasan berdarah oleh minoritas Syiah sesungguhnya merupakan respons terhadap struktur kesempatan politik yang diberikan oleh otoritas pemerintah yang beraliran Sunni. Ketika pemerintah kian mempersempit peluang mengakses hak dasar dan bersikap represif terhadap minoritas yang melakukan tuntutan secara damai, maka kelompok minoritas akan semakin mengintensifkan penggunaan teror sebagai repertoir untuk memaksa pemerintah memenuhi hak-hak mereka. Studi tersebut memberikan sumbangsih pada artikel ini dalam memahami bahwa pola repertoir dalam periode waktu tertentu sangat ditentukan oleh cara pemegang otoritas dalam merespons manuver gerakan minoritas. Sayangnya, kajian tersebut lebih mengedepankan aksi konfrontatif yang menantang secara langsung kelompok dominan. Pendekatan konformis yang bersifat tidak langsung kurang mendapatkan pembahasan dalam tulisan Lawson.

Masih di wilayah Timur Tengah, yakni di Lebanon, Flanigan (2006) menemukan bahwa organisasi paramiliter Hizbullah milik komunitas Syiah menggunakan program bakti sosial kepada kelompok masyarakat miskin dan korban konflik tanpa memedulikan afiliasi keagamaan warga yang menerima bantuan, sebagai sarana mendapatkan legitimasi di tengah stigma internasional yang menuding Hizbullah sebagai “kelompok teroris”. Hizbullah jeli membaca absennya peran negara dalam menyediakan pelayanan kebutuhan dasar bagi warga negara sebagai peluang politik untuk melakukan klaim. Strategi ini terbukti efektif: warga khususnya kalangan menengah ke bawah cenderung membiarkan bahkan turut berpartisipasi mendukung aksi-aksi bersenjata Hizbullah berhadapan dengan kelompok penentangnya. Kajian ini memperlihatkan kerja repertoir dalam bentuk kegiatan sosial yang membantu gerakan mendapatkan legitimasi di dalam negeri.

Konteks politik, yakni lemahnya negara menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Meski demikian, studi Flanigan melangkah terlalu jauh dengan mempertautkan pemberian bantuan sosial sebagai instrumen untuk menormalisasikan penggunaan teror oleh gerakan klandestin berbasis identitas keagamaan.

Mempertimbangkan celah dari penelitian sebelumnya, artikel ini menggunakan konsep *contentious politics* dari Sidney Tarrow dan repertoir yang dirumuskan oleh Charles Tilly sebagai kerangka analisis untuk membaca kasus gerakan IJABI di Jember. Pertama-tama perlu dipahami bahwa kemunculan repertoir didahului oleh apa yang disebut sebagai *contentious politics*. Tarrow (2011) mendefinisikan *contentious politics* sebagai kondisi ketika warga negara berpartisipasi dalam konfrontasi melawan otoritas, elit, atau kelompok yang dianggap sebagai lawan. Pada beberapa kasus, kumpulan warga negara itu menjalin aliansi dengan tokoh yang dianggap berpengaruh. Kondisi tersebut semakin matang kala kesempatan politik yang ada menyediakan peluang bagi gerakan untuk mengambil inisiatif dalam menantang otoritas. Inisiatif atau pilihan tindakan gerakan inilah yang kemudian menjadi repertoir.

Tilly (2006) merumuskan bahwa repertoir merupakan serangkaian tindakan politis yang bersifat rutin, diekspresikan, dan bertujuan untuk melakukan klaim atau pengakuan. Bentuk repertoir tidaklah tunggal karena ada konteks ruang dan waktu yang membatasi pilihan-pilihan taktik. Ia mencontohkan, gerakan sosial di Eropa Barat menggunakan satu atau kombinasi repertoir berupa mimbar bebas, konferensi pers, atau demonstrasi. Namun, mereka tidak akan menggunakan aksi ekstrim, seperti bom bunuh diri atau penyanderaan bersenjata layaknya gerakan pembebasan di Timur Tengah. Meski demikian, Tilly tidak menutup kemungkinan dengan adanya proses modular, yaitu ketika sebuah repertoir di satu tempat dinilai “berhasil” sehingga kemudian coba direplikasikan di tempat lain. Terkait dengan konteks

ruang dan waktu ini, Tilly lebih jauh berargumentasi bahwa gerakan akan senantiasa berupaya mencari peluang untuk mengekspresikan repertoir. Peluang ini disebut sebagai struktur kesempatan politik. Setiap rezim akan menghadirkan struktur kesempatan yang bisa dimanfaatkan sebagai peluang atau justru ancaman, tergantung kepada kelihaihan gerakan sosial untuk meresponsnya.

Porta dan Diani (2006) mengembangkan repertoir yang digagas oleh Tilly. Model aksi protes terbuka seperti demonstrasi atau pendudukan objek vital bisa direplikasi di beberapa tempat. Namun, aksi tersebut berpeluang juga menjadi tidak efektif ketika dipraktikkan di tempat lain. Mereka kemudian menambahkan ada tiga faktor yang menyebabkan repertoir dapat berkembang menjadi banyak varian. *Pertama*, perbedaan karakter subkultur gerakan, seperti ormas keagamaan yang memilih melakukan praktik ritual peribadatan sebagai cara menyampaikan klaim atau gerakan perdamaian yang menolak penggunaan aksi kekerasan dalam menghadapi militerisme. *Kedua*, mekanisme kelembagaan demokrasi sebuah negara, seperti aksi blokade jalan di Swiss lebih jarang terjadi karena negara membuka kesempatan referendum sebagai wujud demokrasi langsung. *Ketiga*, eksperimen gerakan itu sendiri untuk menemukan taktik baru yang dianggap lebih berpeluang mendapatkan perhatian media massa (*newsworthiness*).

Poteete dan Ribot (2011) melakukan modifikasi dengan memperkenalkan konsep repertoir dominasi. Berdasarkan pengamatan pada kasus desentralisasi di Senegal dan Botswana, mereka berangkat dari asumsi bahwa dominasi bukanlah sebuah kondisi yang statis sehingga kelompok dominan secara rutin berupaya mengembangkan dan mempertahankan otoritasnya agar tidak dierosi oleh kelompok-kelompok penentang yang sedang melakukan repertoir perlawanan. Praktik repertoir dominasi sangat bervariasi menurut konteks sosial politik sebuah wilayah. Kelompok dominan diuntungkan dengan

aksesnya untuk menggunakan kekuasaan formal dan informal. Kekuasaan formal dapat berwujud kemampuan kelompok dominan untuk menguasai birokrasi pemerintahan dan kelembagaan hukum sehingga mampu membatasi ruang gerak kelompok penentang melalui regulasi atau pengerahan aparat penegak hukum. Sedangkan kekuasaan informal seperti yang dimiliki oleh elit-elit di akar rumput dapat berbentuk kuasa ekonomi (menentukan siapa yang boleh diajak bertransaksi atau diboikot), kuasa wacana seperti membentuk citra kelompok penentang sebagai “sesat” hingga kekuasaan untuk menggerakkan kekerasan massa.

Meski menggunakan teoritisasi yang ditawarkan Tilly sebagai landasan utama, artikel ini melakukan penyesuaian gagasan Tilly berdasarkan temuan lapangan. Artikel ini bersepakat bahwa suatu tindakan kolektif gerakan agar dapat disebut sebagai repertoir haruslah diekspresikan. Hanya saja, dari berbagai ilustrasi maupun deskripsinya Tilly memiliki kecenderungan bahwa ekspresi repertoir bersifat langsung dan menantang secara terbuka otoritas atau rezim. Studi yang dilakukan terhadap IJABI Jember ini justru menemukan hal sebaliknya: struktur kesempatan politik yang rentan memprovokasi reaksi represif dari kelompok mayoritas *tidak* memungkinkan terjadinya repertoir terbuka oleh minoritas Syiah. Temuan ini pada gilirannya mengafirmasi tawaran kritis yang diajukan oleh Porta dan Diani (2006), bahwa karakter subkultur gerakan yang cenderung menghindari konflik terbuka serta eksperimen IJABI untuk menemukan formula pendekatan yang lebih konformis demi mendapatkan penerimaan sosial, membuat repertoir langsung menjadi tidak relevan. Poteete dan Ribot (2011) menjelaskan bahwa kelompok dominan tidak hanya berperan membuka dan menutup struktur kesempatan politik, tetapi juga melakukan repertoir demi mempertahankan dominasinya dari kelompok Syiah yang dilihat sebagai ancaman.

SOSIO-EKONOMI DAN AKSES PENDIDIKAN WARGA SUNNI-SYIAH DI JEMBER

Secara sosiologis, masyarakat Jember merupakan hibridasi antara transmigran Jawa dan Madura yang menetap sejak masa Kolonial Belanda hingga kemudian asimilasi keduanya membentuk subkultur baru yang disebut sebagai *pendalungan* (Koesoemawati, 2016). Dalam konteks artikel ini, baik pemeluk Syiah maupun Sunni di Jember sama-sama berasal dari komunitas *pendalungan*. Kedua kelompok aliran tersebut juga memiliki tokoh-tokoh agama berdarah Arab sehingga polarisasi Syiah-Sunni di Jember tidak dipertajam oleh sentimen etnisitas. Dalam kehidupan ekonomi, dari total penduduk sebesar 1.032.782 jiwa, masyarakat Jember mayoritas bergerak di sektor pertanian dengan jumlah sebesar 535.944 jiwa (51.89%), 182.175 jiwa (17.63%) lagi bekerja di sektor perdagangan, usaha rumah makan, maupun perhotelan, dan sebesar 53.672 jiwa (5.19%) berprofesi di bidang industri manufaktur (BPS Kabupaten Jember 2015). Berdasarkan kategorisasi profesi tersebut, artikel ini kemudian mencoba mengaitkannya dengan latar belakang para informan. Rata-rata elit IJABI Jember merupakan pekerja di sektor informal, seperti A yang berprofesi sebagai penebang kayu atau Tohir yang membuka praktik pengobatan tradisional. Sebaliknya, tokoh-tokoh elit NU memegang kendali sektor-sektor perekonomian yang strategis, seperti yayasan pendidikan terpadu dan toko sembako (Kyai Hakim, interview, 23 April 2015; Hadi, interview, 21 April 2015).

Kemampuan menyediakan pelayanan dasar berupa institusi pendidikan formal menjadi penanda mencolok ketimpangan antara warga Syiah dan NU di Jember. Minoritas Syiah hanya mampu membangun dua institusi pendidikan, yakni Pesantren Darus Sholihin yang mengelola TK, SD, SMP, dan SMK di Kecamatan Puger dan Yayasan Al-Hujjah yang bergiat di pendidikan tingkat PG-TK di Kecamatan Summersari. Sedangkan NU melalui Lembaga Pendidikan

(LP) Maarif, berdasarkan hasil observasi mampu menyelenggarakan pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas di semua kecamatan di Jember. Dari segi fasilitas, lembaga pendidikan NU juga lebih modern. Pondok Pesantren Assunniyyah di Kecamatan Kencong misalnya, tidak hanya mampu mengelola pendidikan hingga setingkat perguruan tinggi tetapi juga sanggup menyediakan Rumah Sakit Islam. Selain itu, dukungan finansial dari pemerintah kabupaten juga lebih banyak mengalir ke institusi pendidikan NU, seperti alokasi APBD untuk subsidi biaya pendidikan bagi murid TPQ LP Maarif se-Kabupaten Jember dan suntikan dana Program Pendidikan Gratis (PPG) pada SMP Assunniyyah agar dapat menyelenggarakan pendidikan gratis (Khoerus dan Niam, 2017; Prasetyo, 2019).

Bila menggunakan tingkat pendidikan terakhir sebagai parameter, mayoritas penduduk Kabupaten Jember berlatar belakang tidak tamat SD yang bila dinominalkan sebesar 826.874 jiwa (38.52%) dan 729.110 jiwa (33.96%) lainnya merupakan tamatan SD. Jika kategori penduduk tidak tamat SD dan lulusan SD dijumlahkan, maka ditemukan bahwa Kecamatan Puger yang menjadi episenter konflik Sunni-Syiah merupakan kawasan tertinggi kedua se-kabupaten. Habib Ali yang memiliki modal ekonomi jeli membaca realitas sosial tersebut. Pesantren Darus Sholihin membebaskan biaya sekolah dan menggratiskan seragam bagi anak-anak warga setempat yang kurang mampu tanpa memandang latar belakang aliran keagamaan agar mereka dapat mengakses pendidikan (Fatah, interview, 22 April 2015). Ketertinggalan dalam menyediakan layanan pendidikan bagi umat inilah yang lantas menimbulkan kekhawatiran di kalangan elit NU bahwa kaum Syiah tengah menjalankan indoktrinasi terselubung melalui iming-iming pendidikan gratis (Hadi, interview, 21 April 2015).

Sedangkan di Kecamatan Summersari yang dekat dengan pusat kota, rumah tangga Syiah yang tergolong kelas menengah dengan pendapatan bulanan mulai dari Rp1.000.000,00 hingga Rp1.500.000,00 mampu

menyekolahkan anaknya di *playgroup* dan TK milik Yayasan Al-Hujjah (Aprilia, 2018). Selain bergerak di bidang pendidikan, yayasan yang didirikan oleh Fathoni Hadi sejak 1987 ini kerap digunakan sebagai tempat majelis taklim maupun upacara keagamaan Syiah. Tidak diketahui pasti, nominal biaya pendidikan di *playgroup* dan TK Yayasan Al-Hujjah. Namun secara implisit, A dengan penghasilan bulanan Rp 500.000,00 mengaku tidak sanggup jika menyekolahkan anaknya di yayasan tersebut sembari memberikan isyarat jari seperti memegang uang (A, interview, 14 Desember 2014). Di kecamatan lain seperti Tanggul dan Kencong yang tidak terdapat yayasan pendidikan Syiah, elit IJABI Jember sudah merasa cukup menyekolahkan anak maupun cucunya di sekolah-sekolah swasta Islam yang dikelola oleh NU atau Muhammadiyah karena pertimbangan biaya dan jarak yang terlampau jauh untuk mengakses dua sekolah Syiah yang ada (A, interview, 14 Desember 2014; Tohir, interview, 20 April 2015).

SYIAH DI JEMBER: MINORITAS DI BAWAH DOMINASI KYAI DAN NU

Melansir data demografi resmi, populasi penduduk beragama Islam di Kabupaten Jember merupakan mayoritas dengan total sebesar 2.288.106 jiwa (97%), disusul dengan penganut Kristen Protestan sebesar 28.926 jiwa (1.23%), Katolik sebesar 19.247 jiwa (0.82%), Hindu sebesar 5.704 jiwa (0.24%), Budha sebesar 1.049 jiwa (0.04%), dan keyakinan lainnya sebesar 15.813 jiwa (0.67%) (BPS Kabupaten Jember 2015). Secara kuantitatif, data-data sekunder yang ada tidak menyebutkan jumlah pasti populasi warga NU, Syiah, atau kelompok Islam lainnya yang ada di Jember. Namun merujuk pada studi ekstensif yang dilakukan Bustami (2011), masyarakat Jember mayoritas beragama Islam Sunni, berafiliasi dengan NU baik secara struktural maupun praktik kultural, dan terikat dengan sosok kyai sebagai elit

informal. Di sisi lain, meski belum ada data statistik resmi, populasi warga Syiah yang hidup di Jember diperkirakan mencapai 5.000 jiwa (Fatah, interview, 22 April 2015).

Bagi warga muslim Jember, kyai merupakan figur karismatik yang sangat dihormati. Warga yang tengah bimbang menghadapi peliknya masalah hidup lazim meminta pertimbangan pada kyai atau sekadar ingin mendapatkan keberkahan dengan cara didoakan. Studi Chalik (2010) dan Khanif (2011) turut memperkuat betapa strategisnya peranan *lorah* (kyai) dan *gus* (putra kyai) bagi kehidupan masyarakat Jember, termasuk dalam menggiring opini publik ketika merespons isu-isu terkait hubungan antar-umat beragama di aras lokal. Terhadap kelompok minoritas di internal agama Islam yang dinilai menyimpang dari pemahaman Sunni, seperti Syiah dan LDII, hubungan yang terjalin cenderung konfliktual.

Pada kasus Syiah, kyai terbukti berperan aktif membangkitkan sentimen warga NU. Isu bermula pada tahun 2007 ketika seorang kyai kondang Jember bernama Habib Muhdhor menyampaikan melalui ceramahnya di Kecamatan Puger agar masyarakat setempat mewaspadai kerabatnya sendiri yang bernama Habib Ali bin Umar al Habsyi karena menyebarkan ajaran Syiah. Habib Ali merupakan pengasuh Pondok Pesantren Darus Sholihin di Kecamatan Puger yang telah berdiri sejak tahun 1991. Mulanya, masyarakat termasuk pengurus MWC NU Puger menganggap ucapan Habib Muhdhor hanyalah fitnah belaka. Namun oleh Habib Muhdhor, narasi bahwa saudaranya mengajarkan aliran menyimpang berulang kali disampaikan dalam setiap forum pengajian yang diisi olehnya (Izzati dalam Riyadi dan Heryansyah, 2018).

Situasi kian menegang ketika pertengahan bulan Mei 2012 beredar luas rekaman suara ceramah Habib Ali yang tengah mengajarkan keyakinan Syiah kepada para santrinya. Tidak lama berselang, tersebar informasi berantai bernada provokatif melalui SMS bahwa Habib Ali

terbukti melecehkan keyakinan Sunni dan Pondok Pesantren Darus Sholihin menerima bantuan finansial dari Iran (Kepolisian Resort Jember, 2015). Pesan misterius tersebut ditutup dengan seruan agar warga segera bergerak menyerang pondok. Beredarnya ceramah dan provokasi melalui SMS tersebut rupanya bersamaan dengan rencana digelarnya pengajian Habib Muhdhor yang diinisiasi oleh pemuda NU Desa Puger Kulon. Khawatir pengajian tersebut akan dimanfaatkan oleh Habib Muhdhor untuk mengagitasi warga supaya menyerang pondok, maka perwakilan Syiah yang dipimpin Habib Zein mendatangi kediaman Ustad Fauzi selaku ulama NU senior di desa itu untuk meminta klarifikasi terkait rencana pengajian tersebut. Kontak fisik tidak dihindarkan antara kedua kelompok karena Ustad Fauzi merasa tersinggung dengan maksud kedatangan Habib Zein (Wahab, 2014).

Insiden tersebut semakin dipolitisasi oleh Habib Muhdhor. Saat proses penyidikan oleh aparat terhadap rombongan Habib Zein dan kelompok Ustad Fauzi tengah berlangsung, pada saat yang sama Habib Muhdhor dalam ceramah peringatan Isra' Mi'raj 2012 di Kecamatan Tanggul justru meningkatkan eskalasi konflik dengan menyebarkan narasi kebencian. Polarisasi keyakinan Sunni-Syiah semakin dipertajam. Lebih jauh, ia mengajak jamaah dan santri untuk menutup paksa Pondok Pesantren Darus Sholihin bilamana aparat tidak menahan Habib Zein dan rekan-rekannya. Seruan tersebut disambut pekik takbir oleh jemaah.

“Saya tidak ridho, saudara-saudara saya di Puger dibacok-bacoki saya tidak ridho... Aparat kalau tidak bertindak kita akan bergerak. Kita akan turunkan massa, biar lebih banyak lagi nantinya saudara-saudara! Allahuakbar! Syiah laknatullah!... Tutup Pondok Darus Sholihin! Tutup pondokan orang-orang Syiah!”

(Muhdhor, Youtube 2012, <https://www.youtube.com/watch?v=qKDaToa5dQ8>)

Seruuan Habib Muhdhor tersebut mendorong warga NU Puger untuk semakin mencurigai aktivitas komunitas Syiah. Puncaknya terjadi pada 11 September 2013, Ustad Fauzi (seorang tokoh masyarakat) bersama sejumlah warga menolak adanya kegiatan karnaval keliling kampung yang akan dilakukan oleh siswa PAUD Darus Sholihin (Andriansyah, 2013). Namun, pengurus PAUD bersikukuh meski polisi juga sudah memperingatkan. Massa pimpinan Ustad Fauzi melemparkan batu ke arah rombongan pawai yang dibalas oleh santri Syiah. Aksi ini merembet menjadi pengrusakan terhadap aset pondok oleh massa, seperti masjid dan kendaraan roda dua. Meski kerugian harta benda lebih banyak menimpa komunitas Syiah, peristiwa ini malah menewaskan satu orang dari massa NU. Pasca konflik berdarah, Habib Muhdhor memutuskan turun ke lapangan dan menggunakan pengaruhnya sebagai kyai untuk menenangkan warga NU Puger yang berencana melakukan serangan kedua ke Darus Sholihin. Massa mematuhi himbauannya dan memilih berjaga di kediaman Ustad Fauzi.

Pada minoritas LDII, tercatat pada 19 September 2007 terjadi tindak perusakan bangunan masjid semi permanen milik kelompok LDII hingga rata tanah oleh massa warga yang menolak kehadiran aliran tersebut di Wisma Handayani, Kecamatan Tanggul (Yaqin, 2007). Pasca aksi perusakan itu, keesokan harinya di kecamatan yang sama beredar informasi mengenai adanya ancaman aksi penyerangan kedua pada malam hari terhadap aset LDII lainnya, yakni masjid Baitus Sobirin di Jalan Sawo. Meskipun akhirnya tidak terjadi apa-apa, tetapi karena khawatir ikut diserang massa, penduduk non-LDII yang bertempat tinggal di sekitar masjid lantas menuliskan “NU” dan “Warga NU” dengan ukuran besar di tembok rumah masing-masing (detikNews, 2007). Konteks peristiwa yang dialami oleh kelompok Syiah dan LDII menjadi penting agar dapat diperoleh pemahaman bahwa repertoire dominasi kyai dan NU di Jember sedemikian mengakar.

Oleh karena itu, setiap aksi bersifat terbuka yang dianggap menentang keamanan tatanan keagamaan dominan akan direspons dengan persekusi. Selain itu, tragedi Puger pun turut berdampak pada strategi IJABI Jember dalam merumuskan repertoar. Adapun langkah yang dilakukan oleh warga non-LDII tersebut menunjukkan bahwa mengidentifikasi diri dengan identitas NU menjadi semacam penanda bahwa mereka masih merupakan bagian dari mayoritas yang tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok menyimpang yang ada di lingkungan mereka. Dari kasus yang menimpa LDII tersebut, sebagaimana dijelaskan pada subbab berikutnya, IJABI Jember mendapatkan pelajaran berharga untuk menahan diri dari keinginan memiliki tempat peribadatan sendiri demi menghindari potensi konflik yang justru dapat merugikan keberadaan komunitas Syiah di Jember.

IJABI MEMETAKAN PELUANG, MERUMUSKAN STRATEGI 2001–2012: BERGERAK MELALUI DISKUSI DAN AKSI FILANTROPI

IJABI Jember didirikan pada tahun 2001, berselang setahun setelah Pengurus Pusat IJABI mendeklarasikan diri sebagai ormas agama berbadan hukum di Bandung pada tanggal 1 Juli 2000 (IJABI, tanpa tahun). Proses pembentukan IJABI Jember relatif tidak menemui kesulitan berkat peran K.H. Jamaluddin Asmawi, seorang anggota Dewan Syuro Pengurus Pusat IJABI yang disegani karena pengalamannya berdakwah sejak dekade 1980an di area Jember (Zulkifli, 2013; Tohir, interview, 20 April 2015). Sosok Asmawi berperan penting dalam mengonsolidasikan tokoh-tokoh lokal Syiah Jember agar mau bergabung dan mengorganisasikan IJABI di tingkat kabupaten. Setelah resmi diakui pemerintah setempat sebagai ormas melalui surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Bakesbanglinmas

Kabupaten Jember bernomor 070/159/436.46/ORKEMAS/2003/, IJABI Jember mulai merancang strategi untuk menyosialisasikan gerakannya ke masyarakat.

Mempertimbangkan konteks masyarakat yang dominan NU, pengurus IJABI Jember kala itu bersepakat untuk tidak menonjolkan perbedaan dalam hal ritual keagamaan ke ruang publik. Pendekatan moderat seperti menyosialisasikan gerakan IJABI Jember melalui diskusi ilmiah dan kegiatan filantropi dipilih untuk merengkuh simpati warga non-Syiah. Seperti disampaikan oleh Ketua IJABI Jember, diskusi ilmiah mula-mula dilakukan secara personal, yakni masing-masing anggota memperkenalkan ajaran dan gerakannya terbatas hanya pada lingkungan pertemanan dan keluarga dekat (Fatah, interview, 22 April 2015).

Ketika situasi berangsur lebih kondusif, IJABI Jember mencoba mengadakan kegiatan bersifat terbuka. Salah satunya, menggelar forum seminar sehari bertajuk *Paradigma Fiqih Pangkal Keterpurukan* pada 4 Mei 2003 di aula Universitas Jember. Seminar yang turut mengundang Jalaluddin Rakhmat selaku ketua Pengurus Pusat IJABI dan tokoh-tokoh NU sebagai pembicara tersebut bermaksud memperkenalkan identitas IJABI Jember sebagai organisasi Syiah berhaluan moderat, inklusif, dan tidak bermaksud mengubah praktik keagamaan yang sudah mapan di tengah masyarakat (Tohir, interview, 20 April 2015). Meski sudah berusaha meyakinkan melalui repertoir dialog terbuka, penentangan terhadap IJABI Jember dan eksistensi warga Syiah umumnya masih kencang disuarakan oleh tokoh-tokoh NU Jember. Di sisi lain, IJABI Jember tetap menilai acara tersebut sudah cukup berhasil dalam mendapatkan perhatian publik akan adanya organisasi Syiah yang tidak berkarakter ekstrim.

Langkah terbuka IJABI Jember tetap diimbangi dengan sikap berhati-hati. Sekalipun Kecamatan Puger memiliki basis komunitas

Syiah, terutama di area Pesantren Darus Sholihin, namun IJABI Jember cenderung menghindari klaim berupa kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa. Mengingat, kawasan tersebut sangat rentan akan konflik horizontal. Strategi mengambil jarak ini dilakukan setelah salah seorang anggota IJABI Jember melaporkan hasil pengamatannya selama menetap di Kecamatan Puger pada tahun 2003–2005, *“Saya kan pernah menetap di sana dua tahun, 2003 sampai 2005. Tetapi, saya di sana itu kan bekerja sambil mengamati perkembangan mengenai masalah keagamaan di sana.”* (J, interview, 22 April 2015). Meski demikian, terdapat satu-dua orang warga asli yang merupakan penganut Syiah, seperti Ustad H, menyatakan bersimpati pada gerakan IJABI dan tidak segan memberikan bantuan pada anggota IJABI Jember dari kecamatan lain dalam bentuk konsultasi spiritual secara gratis (A, interview 26 April 2015; J, interview, 27 April 2015).

Kesempatan bagi IJABI Jember untuk melakukan klaim muncul pada tahun 2006 ketika bencana nasional banjir bandang menimpa Kecamatan Panti. IJABI Jember memanfaatkan peluang ini dengan baik untuk bergerak lebih dahulu mendekati warga masyarakat dalam rangka memperkenalkan diri karena organisasi masyarakat keagamaan lain seperti NU, luput untuk berinisiatif memberikan bantuan bencana terlebih dahulu. Inisiatif yang dilakukan oleh IJABI Jember semakin mengena karena di saat yang sama menyeruak isu Kristenisasi terhadap korban bencana banjir. Isu tersebut muncul karena adanya tim relawan gereja Katolik St. Joseph Jember yang menyalurkan bantuan di sekitar lokasi bencana banjir (Union of Catholic Asian News, 2006). Seperti diungkapkan oleh Mohammad Ali, anggota dewan syuro IJABI Jember yang ikut turun ke lokasi bencana berikut.

“Yang bikin kita itu apa, para pendeta itu ngusung apa namanya bantuan. Untung ada kita waktu itu. Justru karena kejadian Panti waktu itu orang Kristen mau

mendirikan gereja di Panti itu, karena bukti kerjanya nyata itu. Kepedulianya riil. Saya tahu sendiri. Nah, tapi masyarakat sana meski begitu nolaknya uapik, alus mas. Ualuus sekali. Karena hutang budi mereka pun nolaknya harus dengan akhlak.” (Ali, interview, 22 April 2015).

Sambutan yang diterima IJABI dari masyarakat cukup baik. Terlebih masyarakat Panti yang mayoritas muslim melihat secara positif kehadiran IJABI sebagai representasi organisasi Islam yang peduli. Inisiatifnya dinilai mampu menyelamatkan nama baik Islam di tengah isu Kristenisasi. Bahkan, salah seorang ulama NU di Kecamatan Panti menyumbangkan tiga ekor kambing kepada tim relawan IJABI Jember untuk didistribusikan kepada warga terdampak bencana. Selain memperoleh penerimaan masyarakat, Habib Kadir, dai Syiah yang turut berpartisipasi menjadi relawan IJABI Jember menuturkan bahwa aksi sosial mereka di Kecamatan Panti juga mendapatkan perhatian media cetak lokal bernama *Radar Bromo*. Hal ini membuat gerakan IJABI Jember semakin dikenal di kabupaten tersebut (Kadir, interview, 22 April 2015).

Dalam urusan tata ritual, IJABI Jember menahan diri untuk tidak membangun rumah peribadatan eksklusif bagi umat Syiah. Secara tegas, Pengurus Dewan Syuro IJABI Jember lainnya menyatakan bahwa pembangunan masjid khusus Syiah tidak pernah menjadi strategi apalagi tujuan gerakan karena hal tersebut hanya akan merugikan IJABI Jember sendiri (Tohir, interview, 21 April 2015). Mereka belajar dari pengalaman minoritas LDII yang pada tahun 2007 menerima aksi penolakan dari warga NU karena membangun masjid di Kecamatan Tanggul. Selain itu, sebuah insiden sempat menimpa IJABI Jember cabang Kecamatan Ledokombo pada 8 April 2007. Jemaah pengajian IJABI setempat yang dipimpin oleh Suwarno dan dua anggota lain bernama Nadiro dan Suwardi terpaksa diamankan oleh aparat karena

warga NU berkeberatan dengan aktivitas dakwah Syiah yang mereka lakukan (Keren, 2007; US Department of State, 2008).

IJABI Jember lantas mengambil sikap bahwa peribadatan dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Terkecuali ketika shalat Jumat, para anggota melakukan strategi *taqiyyah* atau melebur dengan ikut beribadah di masjid NU atau Muhammadiyah. Seperti dialami oleh A, tokoh IJABI Jember di Kecamatan Kencong, ia tidak canggung mengikuti shalat Jumat secara rutin di masjid Muhammadiyah yang ada di lingkungan rumahnya. Warga Muhammadiyah yang mengetahui bahwa A adalah Syiah juga tidak mempermasalahkan kehadirannya (A, interview, 23 April 2015). Namun, cerita menjadi lain saat istri A, Nyonya T, mengikuti pengajian ibu-ibu yang diasuh oleh kyai NU pada awal tahun 2012.

Ketika kyai sedang menerangkan materi tentang tata cara berwudhu menurut kaidah Sunni, Nyonya T mengkritisi bahwa cara tersebut tidak sah menurut kaidah Syiah. Aksinya di majelis pengajian tersebut sontak menjadi buah bibir di kalangan hadirin karena berani menyanggah pendapat kyai di forum terbuka, terlebih beberapa anggota pengajian sudah mengetahui bahwa Nyonya T adalah istri pemuka Syiah (A, interview, 24 April 2015; Nyonya T, interview, 24 April 2015). Pasca kejadian menghebohkan tersebut, dalam sesi pengajian berikutnya, sang kyai balik menyindir Nyonya T dengan memperingatkan kepada jemaah pengajian lainnya agar mewaspadaai ajaran sesat Syiah yang sudah masuk di Kecamatan Kencong. Baik Nyonya T maupun A secara personal tidak terlalu mempermasalahkan sindiran itu karena keduanya merasa telah menyampaikan hal yang benar.

2013–2014: KEGIATAN FILANTROPI PASCA TRAGEDI PUGER

Memasuki tahun 2013, sebagaimana dijelaskan secara terperinci pada subbab mengenai kondisi minoritas di bawah dominasi kyai dan NU, eskalasi konflik di Kecamatan Puger semakin memanas. Hal ini turut berimbas pula pada strategi pergerakan IJABI Jember. Sejak pertengahan tahun 2013, aktivitas diskusi lintas agama dan keyakinan bertajuk *Mazhab Cinta* tengah giat dimotori oleh IJABI Jember di Kecamatan Balung yang lebih plural keberagamaannya. Seperti diutarakan oleh sekretaris IJABI Jember, forum *Mazhab Cinta* berupaya menampilkan ajaran Syiah sebagai keyakinan yang memiliki nilai universal layaknya agama lain dan IJABI Jember tidak pernah memiliki agenda mengganggu stabilitas politik sebagaimana dikampanyekan secara masif oleh kalangan NU yang anti-Syiah (Fandi, interview, 25 April 2015). Rutinitas satu bulan sekali diskusi *Mazhab Cinta* sudah dikenal oleh warga di kecamatan tersebut dan bahkan banyak mengundang kalangan pemuda NU, Muhammadiyah, kader PKS, hingga HTI dari wilayah lain untuk turut bergabung dan mendiskusikan isu-isu pluralisme. Kepala KUA dan perwakilan Kantor Departemen Agama Kecamatan Balung sempat hadir serta memberikan apresiasi karena kegiatan *Mazhab Cinta* dinilai ikut mempromosikan keberagaman di kecamatan tersebut (Holili, interview, 25 April 2015).

Forum *Mazhab Cinta* yang telah berjalan selama empat bulan terpaksa berhenti ketika Tragedi Puger meletus pada September 2013. IJABI Jember memutuskan membekukan sementara semua aktivitasnya karena ulama NU, salah satunya Kyai Masykur Hadi yang menjabat anggota *mustasyar* NU Kabupaten Jember, mencurigai adanya campur tangan keterlibatan IJABI Jember yang disebut sebagai “Syiah ekstrim” di balik tragedi berdarah yang memakan korban satu orang dari pihak NU (Hadi, interview, 21 April 2015). IJABI Jember menepis tuduhan itu karena sejak awal merasa tidak melakukan repertoire apa

pun untuk mengklaim kawasan tersebut. Mengambil langkah untuk memvakumkan aktivitas diskusi yang sifatnya sosialisasi ideologi untuk sementara waktu dinilai tepat dalam merespons situasi saat itu. IJABI Jember merasa perlu mengaktifasikan kembali repertoir berupa aksi-aksi sosial seperti di awal kemunculannya dahulu untuk menegaskan klaimnya bahwa gerakan tersebut tidaklah mengajarkan ekstrimisme sebagaimana yang dituduhkan.

Seperti di Kecamatan Puger, Ustad H yang dikenal ahli menguasai ilmu membuat *hiriz* atau jimat menurut tradisi Syiah memulai langkah simpatik dengan membuka jasa kepada warga tanpa memandang keyakinannya. Hal ini cukup efektif. Meskipun warga di kampung tempatnya tinggal mayoritas adalah NU, kenyataannya mereka lebih suka datang ke kediaman Ustad H yang Syiah untuk meminta *hiriz* perlindungan agar aman ketika melaut atau dilindungi dari gigitan serangga berbisa saat mencari kayu bakar di hutan (Ustad H, 26 April 2015). Selain terbukti manjur, Ustad H lebih disenangi karena tidak memungut biaya untuk jasanya dan ringan tangan membantu warga ketika mengalami penyakit non-medis. Hasil observasi menunjukkan bahwa warga di lingkungan kediamannya tampak sangat menghormati Ustad H meski berbeda aliran keagamaan. Karena jasanya pula, warga tidak terlalu mempersoalkan ketika anggota IJABI Jember atau umat Syiah dari wilayah lain mulai berdatangan ke rumahnya pasca Tragedi Puger.

Struktur kesempatan politik bagi IJABI untuk melakukan klaim terbuka lebar saat musibah banjir bandang melanda Kecamatan Kencong pada bulan Desember 2013. IJABI Jember segera responsif mendirikan posko bencana banjir di rumah tempat tinggal A. Sebuah spanduk berukuran besar dengan logo IJABI terpampang di posko tersebut. Hal ini mendapatkan perhatian dari Pengurus Pusat IJABI di Jakarta dan langsung menyebarluaskan kegiatan tersebut melalui media sosial *facebook* lengkap dengan foto para pengurus yang secara

simbolis tengah memberikan bantuan tiga kardus mie instan pada perwakilan pengungsi (PP IJABI, 2014). Berbagai macam santunan seperti selimut, makanan instan, obat-obatan, dan pakaian berhasil didistribusikan oleh IJABI Jember.

Aksi filantropi IJABI Jember itu mendapatkan sambutan baik dari pengurus RT dan RW setempat. Masyarakat pun tidak mempermasalahkan perbedaan keyakinan atau afiliasi organisasi keagamaan karena bagi mereka, seperti diungkapkan Hakim, warga NU yang juga terdampak banjir, santunan dari IJABI Jember terbukti sangat membantu (interview, 27 April 2015). Momentum lainnya yang kian memperkuat klaim gerakan Syiah itu adalah kelambanan NU dalam merespons bencana sehingga masyarakat seperti di Kecamatan Kencong tidak lagi begitu memedulikan sekat Sunni-Syiah. Tokoh NU yang bergiat dalam kegiatan sosial dan pendidikan di Jember mengakui adanya keterlambatan respons karena manajemen tanggap bencana mulai dari pengumpulan donasi hingga pendistribusian yang kurang rapi.

“Saya kadang mikir NU ini yak apa, kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya itu bermanfaat bagi masyarakat itu justru mereka nggak ngurus... Cuma kan malu, malunya kita itu, wong banjir Cakru [sebuah desa di Kecamatan Kencong yang terkena banjir – pen.] sebesar itu, haduh, hanya berapa yang keluar dari NU? Malu kita. Coba satu warga NU. Sak Kecamatan Kencong iku sekilo ae, sekilo, sekilo, sekilo ae, sudah sak arat-arat itu. Itu tidak punya sistem. Pergerakannya ndak mempunyai sistem.”

(Kyai Hakim, interview, 23 April 2015).

Meski terbilang sukses mendapatkan pengakuan masyarakat dan tokoh NU, repertoire IJABI masih saja mendapatkan reaksi penentangan. Kediaman A yang tengah difungsikan sebagai posko sempat didatangi oleh polisi pada akhir bulan Desember 2013. Aparat meminta supaya spanduk IJABI Jember yang terpampang mencolok dari jalan raya supaya diturunkan karena adanya laporan bahwa spanduk tersebut meresahkan masyarakat. Tuntutan tersebut disertai dengan peringatan bahwa polisi tidak akan bertanggung jawab bila terjadi sesuatu terhadap diri A dan keluarganya jika spanduk tetap dipasang (A, interview, 15 November 2014). A tak bergeming. Dirinya tidak bersedia memenuhi tuntutan aparat bahkan menyatakan bahwa segala bentuk risiko yang mungkin timbul akan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Pada akhirnya, ancaman yang dimaksud pihak kepolisian tidak pernah terjadi. Posko bantuan IJABI Jember tetap berkegiatan normal tanpa gangguan hingga bencana banjir dinyatakan telah terkendali pada bulan Januari 2014. A sendirilah yang mencopot spanduk besar di depan rumahnya ketika tugas relawan dan posko IJABI Jember dinyatakan selesai. Hingga penelitian lapangan dilakukan, masih tidak diketahui identitas pelapor yang menyatakan keberatan terhadap spanduk IJABI Jember di rumah A.

Perlahan, masyarakat mulai bisa menerima keberadaan minoritas Syiah, terlebih kepada anggota IJABI setelah aksi bantuan sosial bencana banjir Kecamatan Kencong menjadi viral. Namun begitu, diskusi rutin *Mazhab Cinta* tetap dihentikan hingga waktu yang belum ditentukan. Sebagai gantinya, pengurus IJABI Jember justru rutin mendatangi forum-forum pengajian NU di berbagai desa di wilayah Jember. Langkah yang terbilang berani tersebut dilakukan dalam rangka bersilaturahmi (Tohir, interview, 15 November 2014). Seperti pengajian NU di masjid Kecamatan Tanggul yang peneliti ikuti selepas waktu Isya' pada 14 November 2014, Tohir dan A disambut baik oleh jamaah pengajian yang kebanyakan adalah kyai kampung. Pengasuh

pengajian tersebut bernama Kyai Haqi, ulama lulusan Pondok Sidogiri Pasuruan yang dikenal sebagai lembaga pendidikan NU berhaluan anti-Syiah. Meski tahu bahwa Tohir dan A merupakan pengurus IJABI Jember, Kyai Haqi tetap mempersilakan keduanya menyimak, bahkan mengajukan pendapatnya menurut ajaran Syiah dalam sesi tanya jawab. Repertoir ini tetap rutin dilakukan oleh anggota IJABI Jember lainnya sebagai upaya klaim bahwa penganut Syiah tidak bersikap antipati terhadap aktivitas keagamaan kelompok mayoritas dan mampu membaaur dengan masyarakat.

MENJELASKAN POLA REPERTOIR IJABI JEMBER

Temuan data yang telah dielaborasi menunjukkan bahwa sebagai gerakan sosial yang mengupayakan penerimaan sosial terhadap minoritas Syiah, IJABI Jember menempuh dua pola repertoir sebagai strategi memperoleh klaim: kegiatan diskusi keilmuan bersifat terbuka dan aksi filantropi. Keduanya digunakan secara bergantian dengan mempertimbangkan struktur kesempatan politik yang tersedia, baik peluang pada kurun waktu tertentu. Selain itu, IJABI Jember juga mengukur sumber daya gerakan yang mereka miliki. Meski tidak memiliki banyak lembaga pendidikan formal seperti NU, kader-kader IJABI mengisi kekosongan tersebut dengan mendorong generasi mudanya untuk banyak membaca buku teks Syiah sehingga mereka dapat diandalkan ketika berada di forum diskusi. Sedangkan aksi filantropi lebih banyak mengandalkan donasi dari masyarakat, termasuk bantuan dari Pengurus Pusat IJABI di Jakarta untuk menyebarluaskan agenda sosial mereka sehingga semakin banyak bantuan yang masuk.

Agak berbeda dengan teoritisasi Tilly (2004; 2006) yang cenderung melihat repertoir sebagai ekspresi bersifat langsung dan konfrontatif terhadap pemegang otoritas, IJABI Jember terlihat berhati-hati dalam melakukan repertoir. Hal ini tidak lepas dari tujuan IJABI Jember yakni

memperoleh penerimaan sosial di tengah masyarakat, bukan melakukan destabilisasi atas dominasi NU dan menggantikannya dengan nilai-nilai Syiah. Selain itu, artikel ini mengembangkan konsepsi Tilly mengenai struktur kesempatan politik dengan mentipologikannya kedua bentuk: artifisial (dikreasikan baik secara sengaja maupun tidak oleh pemegang otoritas formal seperti pemerintah kabupaten dan otoritas informal seperti masyarakat dan elit NU) dan natural (momentum bencana alam).

Pada kurun 2001–2012, IJABI Jember memilih beroperasi secara klandestin dengan menyosialisasikan ajaran Syiah dan memperkenalkan gerakan di lingkup keluarga dekat. Pertimbangan utama dipilihnya strategi ini adalah karena status gerakan yang kala itu masih belum memperoleh pengakuan sebagai ormas berbadan hukum dari pemerintah Kabupaten Jember sehingga potensi tuduhan sebagai gerakan ilegal akan terbuka jika IJABI Jember berani mengambil repertoir langsung (Ali, interview, 22 April 2015). Situasi sepanjang tahun 2001–2003 dapat dikatakan sebagai fase 0 bagi gerakan karena aktivitas konsolidasi lebih ditujukan ke internal untuk memperkuat keanggotaan organisasi. Struktur kesempatan politik artifisial untuk melakukan repertoir ke khalayak publik mulai terbuka ketika pemerintah kabupaten melalui Kesbangpol Jember menyatakan IJABI Jember sebagai ormas legal pada 2003. Di tahun yang sama, peluang emas tersebut segera dimanfaatkan dengan menggelar seminar sehari. Secara ekspresif, IJABI Jember turut menghadirkan Jalaluddin Rakhmat yang merupakan figur Syiah nasional. Klaim tersebut menimbulkan respons berupa meningkatnya kewaspadaan mayoritas NU terhadap aktivitas jamaah IJABI Jember bahwa sebuah ormas Syiah telah hadir di tengah mereka.

Repertoir kembali ke fase 0 pada periode 2004–2005. IJABI Jember memilih melakukan observasi terhadap kondisi sosial keagamaan di Jember, khususnya di Kecamatan Puger yang berpotensi konflik.

Setelah melakukan kalkulasi, risiko kerugian yang timbul bagi gerakan akan besar jika IJABI Jember memaksakan diri untuk melakukan klaim di kawasan tersebut. Struktur kesempatan politik artifisial hampir tidak ada, mengingat resistensi NU setempat terhadap Syiah demikian tinggi. Dengan demikian, aktivitas klaim di Puger maupun di wilayah lain sementara waktu urung dilakukan. IJABI Jember kembali bergerak ketika struktur kesempatan natural terjadi: banjir bandang Kecamatan Panti 2006. Struktur kesempatan artifisial menyusul kemudian: NU terlambat merespons bencana dan isu Kristenisasi pengungsi oleh relawan gereja merebak. Hasilnya, repertoir IJABI Jember dengan membentuk relawan tanggap bencana di lokasi banjir mendapatkan respons positif dari penduduk lokal hingga kyai NU setempat berkenan mendonasikan kambingnya tanpa memedulikan perbedaan ormas maupun aliran keagamaan. Lebih dari itu, kedatangan IJABI Jember diklaim sebagai representasi ormas Islam yang berhasil menyelamatkan warga muslim dari apa yang disebut dengan “ancaman Kristenisasi”. Sorotan harian lokal menguatkan eksistensi IJABI Jember sebagai ormas Syiah yang menempuh pendekatan konformis tanpa memiliki tujuan untuk men-Syiah-kan korban banjir. Sebagaimana dikembangkan dari argumentasi Diani dan Porta (2006), eksperimentasi repertoir IJABI Jember melalui aksi filantropi jauh lebih berhasil meraih klaim di masyarakat dan media massa daripada repertoir diskusi ilmiah yang lebih kental nuansa pengenalan ideologi Syiah.

Akan tetapi, struktur kesempatan politik tertutup lagi ketika cabang IJABI Jember di Kecamatan Ledokombo melakukan repertoir dengan mendakwahkan ajaran Syiah melalui pengajian terbuka. Respons masyarakat berubah negatif hingga otoritas aparat turun tangan menetralkan situasi. Akibatnya, IJABI Jember kembali lagi ke fase 0 untuk memformulasikan strategi yang tepat supaya bisa diterima kembali oleh masyarakat. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat dibaca sebagai keberhasilan repertoir dominasi NU untuk mengerahkan

dua jenis kuasa sekaligus. Kuasa formal tercermin dari kesediaan polisi menindak pengurus IJABI sebagaimana diharapkan mayoritas warga, serta kuasa informal dalam bentuk pengerahan massa untuk mengintimidasi tokoh-tokoh IJABI Jember di Ledokombo. *Taqiyyah* lantas menjadi opsi rasional sebagai repertoir untuk meminimalisasikan potensi terjadinya gesekan di ruang publik. Terbukti langkah ini lebih dapat diterima oleh mayoritas. Seperti yang dialami oleh A, meski masyarakat mengenalnya sebagai pemuka Syiah, namun warga tidak memperlmasalahkannya keikutsertaannya dalam ibadah shalat Jumat karena A bersedia melakukan praktik ibadah sebagaimana lazimnya keyakinan mayoritas Sunni.

Gesekan timbul kembali kala ekspresi repertoir menjadi konfrontatif kepada pemegang otoritas informal. Kehadiran Nyonya T ke pengajian NU secara simbolis sebenarnya sudah merupakan klaim. Keberaniannya menyanggah pendapat kyai adalah peningkatan eskalasi repertoir dari aksi konformis menjadi aksi langsung seperti diandaikan Tilly (2004). Akibatnya, klaim ini direspons oleh kyai NU dengan sindiran agar mewaspadaikan ajaran Syiah. Karena sindiran tersebut dinilai sebagai gertakan belaka tanpa menutup struktur kesempatan politik, IJABI Jember mencoba melakukan repertoir yang bersifat sosialisasi doktrin Syiah dengan menginisiasi forum Mazhab Cinta pada 2013.

Berbeda dengan forum seminar sehari dan pengajian yang menuai reaksi negatif, warga di Kecamatan Balung dapat menerima klaim ini. Namun, repertoir menjadi fase 0 lagi ketika struktur kesempatan politik tertutup akibat Tragedi Puger. Repertoir ideologi melalui diskusi dianggap tidak relevan untuk merespons balik peningkatan sentimen anti-Syiah dan IJABI di Jember karena dinilai terlalu frontal. Di tengah kebuntuan, IJABI Jember melakukan modularisasi, yakni mereplikasi keberhasilan mereka mendapatkan penerimaan masyarakat melalui kegiatan filantropi seperti tahun 2006. Repertoir aksi tanggap bencana pada 2013 yang sifatnya konformis berhasil meneguhkan klaim IJABI

Jember sebagai organisasi Syiah yang tidak ekstrim. Setelah struktur kesempatan terbuka lagi, IJABI Jember kembali bereksperimen dengan berepertoir ke masjid-masjid NU untuk menyosialisasikan paham Syiah secara perlahan-lahan.

KESIMPULAN

Pengalaman IJABI Jember menunjukkan bahwa gerakan sosial minoritas mampu memperoleh penerimaan sosial dari kelompok mayoritas bila mengekspresikan repertoir bersifat tidak langsung, menyentuh dimensi sosial-ekonomi, dan tidak berupaya menampilkan dan menegaskan perbedaan bersifat teologis di ruang publik. Struktur kesempatan politik artifisial yang tersedia di Jember pada kurun 2001–2012 nyaris menutup peluang bagi IJABI Jember untuk melakukan klaim doktrin Syiah. Terbukti dengan meningkatnya intensitas repertoir dominasi yang dilakukan oleh warga NU sebagai upaya mempertahankan otoritas seperti penggunaan kekuatan fisik pada kasus pengajian di Ledokombo, sindiran atau narasi kebencian oleh oknum kyai sebagai ekspresi kuasa informal, hingga menggunakan perantara aparat penegak hukum untuk merespons aktivitas IJABI Jember.

IJABI Jember dapat menetralkan situasi dengan mengisi struktur kesempatan politik yang lain, yaitu bencana alam yang merupakan struktur kesempatan natural. Hal tersebut dikombinasikan dengan absennya NU pada isu-isu pemberdayaan sosial, seperti pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana dan pemenuhan kebutuhan spiritual dalam bentuk pemberian jimat gratis yang menunjang kegiatan warga dalam bekerja agar aman dari gangguan. Repertoir aksi filantropi lebih efektif meyakinkan kelompok mayoritas bahwa IJABI Jember bukanlah gerakan Syiah ekstrim yang berusaha mendelegitimasi pranata keyakinan mayoritas sebagaimana diwacanakan oleh kyai NU serta

mendapatkan publikasi yang lebih luas dari media (*newsworthiness*). Artikel ini membuka dua peluang bagi eksplorasi di masa mendatang, yakni bagaimana gerakan minoritas keagamaan lainnya melakukan repertoir dan kemungkinan pendalaman terhadap praktik repertoir dominasi kelompok mayoritas.

REFERENSI

- Afdillah, M. (2016). *Dari Masjid ke Panggung Politik (Melacak Akar-akar Kekerasan Agama Antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur)*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Alfiyah, N. (2014). Menteri Agama Tampung Keluhan Diskriminasi Syiah. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/593430/menteri-agama-tampung-keluhan-diskri-minasi-syiah>.
- Aprilia, K. (2018). *Hubungan Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Kemampuan Sosial Anak Kelas A di TK Plus Al-Hujjah Kecamatan Summersari Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2017/2018* (undergraduate's thesis). Jember: Universitas Jember Indonesia.
- Assegaf, U. F. (2012). *The Rise of Shi'ism in Contemporary Indonesia: Orientation and Affiliation* (master's thesis). Canberra: Australian National University.
- BPS Statistik Kabupaten Jember. (2015). *Kabupaten Jember dalam Angka 2015*. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- Bustami, A. L. (2011). Tapal Kuda Bergolak: Suatu Kajian tentang Resistensi terhadap Pelengseran Presiden Gus Dur 2001. *Antropologi Indonesia*, 32 (1), 14–29.
- Chalik, A. (2010). Religion and Local Politics: Exploring the Subcultures and the Political Participation of East Java NU Elites in the Post-New Order Era. *Journal of Indonesian Islam*, 4 (1), 109–150.
- Flanigan, S. T. (2006). Charity as Resistance: Connections between Charity, Contentious Politics, and Terror. *Studies in Conflict & Terrorism*, 29 (7), 641–655.
- Idhom, A. M. (2013). Front Jihad Desak MUI Yogya Nyatakan Syiah Sesat. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/538791/front-jihad-desak-mui-yogya-nyatakan-syiah-sesat>.

- Izzati, A. R. (2018). Konflik Agama Antara “Sunni-Syiah” di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. In E. Riyadi & D. Heryansyah (Eds), *Optimalisasi Peran FKUB Mewujudkan Indonesia Damai* (pp. 71-105). Yogyakarta: Pusham UII.
- Kepolisian Resort Jember (2015). Konflik Sosial Syiah–Sunni di Kab. Jember. *Scribd*. <https://www.scribd.com/doc/274021960/Konflik-Syiah-Sunni-Di-Kab-Jember>.
- Keren, A. (2007). Polres Jember Waspada Jamaah Ijabi. *NU Online*. <https://www.nu.or.id/post/read/8711/polres-jember-waspada-jamaah-ijabi>.
- Khanif, A. (2011). Menguji Kharisma Kyai dalam Kehidupan Masyarakat Madura Jember Jawa Timur. *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 5 (1), 121–146.
- Khoerus & M. Niam (2017). Bupati Jember Puji Keberhasilan Ma’arif NU. *NU Online*. <https://www.nu.or.id/post/read/77957/bupati-jember-puji-keberhasilan-maarif-nu>.
- Koesoemawati, D. J. (2016). Social Cohesion of Pendalungan Community and Urban Space Integration in Jember. *Komunitas*, 8 (1), 145–54.
- Latief, H. (2008). The Identity of Shi’a Sympathizers in Contemporary Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 2 (2), 300–335.
- Lawson, F. H. (2012). Repertoir Perseteruan di Bahrain Kontemporer. In Q. Wiktorowicz (Ed), *Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial* (pp. 217–259). Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
- Porta, D. D. & M. Diani (2006). *Social Movements, an Introduction*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Potetee, A.R. & J. C. Ribot (2011). Repertoires of Domination: Decentralization as Process in Botswana and Senegal. *World Development*, 39 (3), 439–449.

- PP IJABI. (2014). Posko Peduli Korban Banjir. *Facebook*. <https://web.facebook.com/ijabi.pusat/photos/a.1394377090863993/1394383154196720/?type=3>.
- Prasetyo, D. B. (2019). Bupati Jember Resmikan SMP Assuniyah Kencong. *Times Indonesia*. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/196285/bupati-jember-resmikan-smp-assuniyah-kencong>.
- Savitri, I. (2012). Hanya MUI Jawa Timur yang Teken Fatwa Syiah Sesat. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/426499/hanya-mui-jawa-timur-yang-teken-fatwa-syiah-sesat>.
- Tarrow, S. (2011). *Power in Movement, Social Movements and Contentious Politics*. New York: Cambridge University Press.
- Tilly, C. (2004). *Social Movements 1768-2004*. London: Paradigm Publishers.
- Tilly, C. (2006). *Regimes and Repertoires*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Union of Catholic Asian News (2006). Catholic Church Gives Emergency Helps to Disaster Victims. *UCANews*. https://www.ucanews.com/story-archive/?post_name=/2006/01/13/catholic-church-gives-emergency-help-to-disaster-victims&post_id=26742.
- US Department of State. *Annual Report on International Religious Freedom 2007: Report Submitted to the Committee on Foreign Affairs U.S House of Representatives and the Committee on Foreign Relations U.S Senate*. Wahington DC: U.S Government Printing Office.
- Wahab, A. J. (2014). *Manajemen Konflik Keagamaan (Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Yaqin, A. A. (2007). Ratusan Warga Jember Hancurkan Masjid LDII. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/news/read/147832/ratusan-warga-jember-hancurkan-masjid-ldii>.
- Zulkifli. (2013). *The Struggle of the Shi'is in Indonesia*. Australia: ANU E Press.